

**GERAKAN SOSIAL WOMEN'S MARCH JAKARTA DALAM  
MELAKUKAN KONSTRUKSI ATAS ANTI KEKERASAN SEKSUAL  
PADA PEREMPUAN DI INDONESIA**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata I  
Pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika**

**Oleh:  
ELFINA ANUGRAHI SAPUTRI  
L100160154**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**GERAKAN SOSIAL WOMEN'S MARCH JAKARTA DALAM MELAKUKAN  
KONSTRUKSI ATAS ANTI KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DI  
INDONESIA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh :

**ELFINA ANUGRAHI SAPUTRI**

**L100160154**

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



**Nur Latifah Umi Satiti, S.Sos., M.A**

**NIK.1182**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**GERAKAN SOSIAL WOMEN'S MARCH JAKARTA DALAM MELAKUKAN  
KONSTRUKSI ATAS ANTI KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DI  
INDONESIA**

**OLEH :**

**ELFINA ANUGRAHI SAPUTRI**

**L100160154**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Komunikasi dan Informatika  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari ..9... , Juni..., 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji :**

- 1. Nur Latifah Umi Satiti, S.Sos., M.A  
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Ratri Kusumaningtyas, S.Pd., M.Si  
(Anggota I Dewan Penguji )**
- 3. Yanti Haryanti, S.Pd., M.A  
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)  
(.....)  
(.....)

**Dekan,**



**Nurgiyatna, S.T., M.Sc., Ph.D**

**NIK. 881**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 4 Juni 2020

Penulis



**ELFINA ANUGRAHI SAPUTRI**

**L100160154**

# **Gerakan Sosial Women's March Jakarta dalam Melakukan Konstruksi atas Anti Kekerasan Seksual pada Perempuan di Indonesia**

## **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kampanye yang dilakukan oleh gerakan sosial Women's March Jakarta dalam mengonstruksikan anti kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia. Gerakan ini melakukan kampanyenya melalui berbagai kegiatan mereka secara offline dan online. Dilihat dari kegiatan online yang dilakukan, sosial media Instagram merupakan salah satu media yang digunakan oleh gerakan ini dalam membentuk jaringan, dukungan, sekaligus kekuatan untuk menentang praktik kekerasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis pada penelitian ini yakni dengan melakukan analisis isi. Unit analisis dalam penelitian ini berupa teks-teks dan gambar sebagai kegiatan kampanye. Sampel yang diteliti yakni postingan Instagram Women's March Jakarta pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui gerakan ini, kekerasan seksual dikonstruksikan sebagai isu yang masih kerap menimpa kaum perempuan dan dinilai cukup mendesak di Indonesia. Gerakan ini juga melihat bahwa isu tersebut merupakan milik semua orang termasuk peran Negara turut diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Kampanye yang dilakukan juga merupakan sebagai alternatif bentuk keadilan untuk para korban dan sebagai bentuk aksi anti terhadap kekerasan.

**Kata Kunci :** analisis isi, kekerasan seksual, online movement, perempuan.

## **Abstract**

This article aims to find out how Women's March Jakarta Movement campaign to construct anti-sexual violence against women in Indonesia. This movement campaigns through their various activities offline and online. They do online campaign by social media like Instagram to form support, network and strength in opposing violent practice. This research uses descriptive qualitative. The analysis technique in this research is to do content analysis. The unit of analysis in this study is texts and images as campaign activities. The sample examined is Women March Jakarta's Instagram post in 2019. The research results show that women still often experience sexual violence. That issue is considered quite urgent in Indonesia. However, this movement knows that the issue belongs to everyone. At the same time, the role of the state is also needed to provide legal protection for victims of sexual violence. The campaign is also an alternative form of justice for the victims and as a form of action against violence.

**Keywords :** content analysis, sexual violence, online movement, women.

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Gerakan perempuan merupakan aksi yang diorganisir secara bersama oleh kaum perempuan dengan tujuan untuk mengajukan beberapa tuntutan dalam kehidupan publik berdasarkan identitas gender sebagai perempuan (McBride & Mazur, 2008). Seiring perkembangannya, gerakan ini mengalami perubahan menjadi lebih bersifat komunikatif yaitu dari offline ke online. Menurut (Knappe & Lang, 2014) jaringan dan penjangkauan yang dilakukan dalam

kampanye secara online dengan fasilitas yang diberikan oleh teknologi baru berupa internet justru mampu memberikan efek yang jauh lebih besar. Bagi gerakan perempuan dengan adanya perkembangan teknologi tersebut telah berhasil memberikan kesempatan perempuan untuk menyuarakan segala pendapat, pemikiran, sekaligus membantu mereka terbebas dari batas-batas dan kategori yang selama ini mengekang mereka dan identitas diri mereka (Keller, 2017).

Women's March merupakan salah satu contoh gerakan sosial yang berusaha untuk menyuarakan isu-isu terkait dengan kehidupan perempuan. Gerakan ini pertama kali diselenggarakan di Washington DC pada 21 Januari 2017 dengan misi yang mereka miliki yakni untuk memobilisasi serta mengumpulkan aksi guna membela hak asasi perempuan secara global (Dianawanti, 2019).

Pada awalnya gerakan ini merupakan bentuk aksi protes yang dilakukan oleh Teresa Shook melalui akun Facebooknya dengan mengundang teman-temannya untuk melakukan long march. Aksi ini terjadi karena dipicunya oleh pernyataan-pernyataan Presiden Amerika Serikat ke-45 yaitu Donald Trump yang dinilai tidak pantas dinyatakan kepada kaum perempuan. Setelah itu, mulailah bermunculan akun-akun lain yang turut berusaha mengangkat persoalan tersebut. Mereka secara bersama-sama membangun kekuatan dan membuat satu laman Facebook resmi "Women's March On Washington" yang telah berhasil menarik puluhan ribu perempuan untuk terlibat ke dalam aksi ini (Prandansari, 2018).

Melihat dari besarnya pengaruh yang telah dihasilkan dari aksi Women's March kemudian membuat gerakan ini tidak hanya dilakukan di Amerika Serikat saja, melainkan beberapa Negara lainnya juga turut melakukan gerakan ini termasuk Indonesia (Putri, 2019). Selain itu, alasan dilakukannya Women's March di Indonesia yaitu dilihat dari masih banyaknya isu-isu mengenai perempuan yang masih perlu untuk mendapatkan sorotan. Isu-isu tersebut antara lain seperti pemenuhan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, kekerasan dan pelecehan seksual yang sampai saat ini kerap dialami oleh perempuan (Prandansari, 2018).

Hak asasi perempuan sendiri merupakan hak yang wajib diperoleh perempuan, baik karena ia sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Sehingga, ketika tidak diperolehnya hak tersebut maka disebut juga dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Kania (2015) pada tulisannya berjudul "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" kaum perempuan masih terbilang cukup

tertinggal atau termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, maupun bidang politik.

Menurut Fakih (2013) dalam bukunya Analisis Gender & Transformasi Sosial, menunjukkan contoh realitas belum terpenuhi segala hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia antara lain terlihat pada bidang pekerjaan. Pada bidang ini perempuan masih kerap memperoleh pengucilan dari kerja upahan dan jenis kerja tertentu. Tercatat buruh migran perempuan yang bekerja pada sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga mencapai 70 persen. Selain itu, buruh migran memiliki situasi kerja yang bersifat eksploitatif, memiliki gaji yang rendah, jam kerja panjang, serta tidak adanya jaminan sosial maupun kesehatan. Oleh sebab itu, mereka sangat rentan dalam memperoleh kekerasan sekaligus hal tersebut termasuk juga sebagai pelanggaran HAM (Setiawati, 2002).

Begitu juga dengan bidang lainnya, seperti pada bidang politik. Menurut Wahyudi (2018) keterwakilan kaum perempuan pada bidang politik hanya memiliki kuota sebesar 30%. Melihat rendahnya partisipasi perempuan tersebut akhirnya mengakibatkan berbagai kepentingan perempuan sampai saat ini belum terwujud sepenuhnya dan sekaligus masih kurangnya kebijakan yang berperspektif gender.

Berbagai isu mengenai perempuan tersebut terjadi tentunya tidak terlepas dari budaya patriarki yang sampai saat ini masih melekat pada pola pikir masyarakat sehingga menjadikan sebagai faktor penyebab (Sakina & A., 2017). Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai sosok yang mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi kaum perempuan (Walby, 1989). Masyarakat yang menganut sistem patriarki ini meletakkan kaum laki-laki pada posisi dan kedudukan yang dominan dibandingkan dengan kaum perempuan. Sedangkan kaum perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu, dominasi laki-laki terhadap perempuan di Indonesia masih menjadi sebuah ancaman bagi eksistensi kaum perempuan.

Permasalahan yang kerap dihadapi oleh perempuan sebagai dampak atas berlangsungnya budaya patriarki kemudian turut melahirkan berbagai ketidaksetaraan gender sekaligus menciptakan tindakan kekerasan terhadap perempuan (Sihite, 2007). Menurut (Ellis, 1991), dalam karyanya A Synthesized (Biosocial) Theory of Rape lebih spesifiknya pada bagian The Feminist theory of Rape menjelaskan mengenai relasi antara kedudukan perempuan dengan tindak pemerkosaan ataupun kekerasan seksual yang mereka peroleh.

Secara mendasar dijelaskan bahwa tindak kekerasan seksual sebenarnya berasal dari tradisi sosial yang menempatkan kaum laki-laki pada kedudukan yang mendominasi kaum perempuan di segala aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Teori feminist (Ellis, 1991) memandang bahwa perempuan memperoleh kekerasan ataupun pemerkosaan dikarenakan adanya ketidaksetaraan. Kemudian, ketidaksetaraan tersebutlah yang akhirnya memberikan pengaruh kepada laki-laki terkait bagaimana cara mereka bertindak secara seksual untuk mendominasi perempuan. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa yang sebenarnya menjadi motif dari praktik kekerasan ataupun pemerkosaan yakni bukanlah perihal kepuasan seksual, melainkan sebagai sebuah bukti adanya dominasi dan kontrol yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Oleh sebab itu, sebagaimana diungkapkan Sihite dalam bukunya berjudul “*Perempuan, Kesenjangan & Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*” tindakan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan cenderung mengalami peningkatan jumlah kasus (Sihite, 2007).

Menurut Harnoko (2010) kekerasan seksual menimpa kaum perempuan pada sektor publik dan privat. Kekerasan seksual di sektor publik kerap dialami oleh kaum perempuan tanpa mengenal pakaian yang mereka kenakan, bahkan kapanpun dan dimanapun mereka berada. Melalui temuan survei yang dilakukan oleh HollaBack! Jakarta, Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (JFDG) dan Change.org Indonesia terkait persentase kasus kekerasan seksual yang ditemukan di ranah publik ternyata mayoritas korbannya sama sekali tidak mengenakan pakaian yang terbuka, melainkan mereka kebanyakan mengenakan celana atau rok panjang (18%), berkerudung (17%), baju lengan panjang (16%). Hasil survei lainnya yang juga ditemukan menunjukkan bahwa persentase waktu ketika para korban mendapat pelecehan seksual terjadi pada siang hari (35%) dan pada sore hari (25%). Melihat hasil survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab dari terjadinya kekerasan seksual di ranah publik bukanlah karena dipicu dari pakaian ataupun waktu dan keberadaan si korban (Affan, 2019).

Kemudian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu contoh dari tindakan kekerasan terhadap perempuan di sektor privat dimana budaya patriarki telah berhasil memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal kekuasaan yang dimiliki oleh kaum laki-laki jauh lebih besar dibanding dengan perempuan. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga, istri memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan dan melakukan segala



keinginannya. Terdapat studi tentang kekerasan dalam rumah tangga oleh (Bennett, Andajani-Sutjahjo, & Idrus, 2011) yang menjelaskan bahwa mayoritas para perempuan enggan untuk melaporkan tindakan kekerasan yang mereka peroleh kepada pihak berwenang karena sebagian besar dari mereka merasa bahwa pengalaman tersebut merupakan hal yang normal dan wajar terjadi di dalam kehidupan rumah tangga.

Melihat dari berbagai polemik mengenai kekerasan seksual akibat adanya ketidaksetaraan gender yang menimpa kaum perempuan di Indonesia tersebutlah yang akhirnya melandasi diadakannya Women's March di Indonesia. Di Indonesia sendiri, gerakan sosial Women's March pertama kali diadakan oleh Jakarta Feminist Discussion Group pada 4 Maret 2017 tepatnya di Jakarta (Putri, 2019).

Women's March Jakarta berusaha menjadikan gerakan ini sebagai wadah aspirasi masyarakat demi terwujudnya kesetaraan gender terutama perihal pemenuhan hak-hak perempuan sekaligus turut menentang tindakan kekerasan seksual yang selama ini menimpa perempuan. Kemudian dalam mewujudkan tujuan tersebut, gerakan ini juga memanfaatkan munculnya sosial media dan internet yang merupakan bentuk dari teknologi baru dalam melakukan perubahan sosial. Menurut (Guha, Gajjala, & Stabile, 2019) platform sosial media telah mengalami perkembangan seperti halnya aktivisme sosial media dalam melawan kekerasan seksual. Hal tersebut, terlihat pada saat ini semakin banyaknya perempuan yang berusaha melanjutkan perjuangan mereka untuk melawan kekerasan dengan memanfaatkan platform sosial media guna membangun dukungan, kekuatan sekaligus menyediakan ruang bagi mereka yang menderita kekerasan seksual untuk berbagi segala pengalaman menyakitkan mereka.

Sosial media Instagram merupakan salah satu media yang digunakan oleh gerakan ini dalam menyebarkan ideologi mereka terkait anti kekerasan seksual terhadap perempuan. Instagram sendiri merupakan sosial media yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto, video serta pesan dalam bentuk teks. Instagram juga dilengkapi dengan berbagai fitur lengkap lainnya. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh WeAreSocial pengguna Internet di Indonesia sendiri mencapai 150 juta. Kemudian dari jumlah tersebut, sebesar 80% merupakan pengguna Instagram (Kemp, 2019). Sehingga lewat instagram, mereka yang hirau mengenai isu perempuan turut diajak untuk menyatakan segala aspirasi mereka ke dalam aksi melawan kekerasan.

Hal di atas juga didukung dengan sekitar 14ribu pengikut yang dimiliki oleh gerakan ini melalui akunInstagram @womensmarchjkt. Selain itu, gerakan ini telah mengunggah sekitar 200 postingan berisikan informasi ke dalam bentuk foto, video, tulisan-tulisan perihal isu-isu perempuan sekaligus 10 tuntutan yang menjadi fokus mereka yakni kesetaraan gender serta perihal menghentikan tindak kekerasan seksual pada perempuan. Selain itu, Women's March Jakarta juga mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan aksi massa dengan turun ke jalan secara langsung disertai dengan membawa poster berisikan tulisan untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka. Selain dilakukannya aksi massa dengan turun ke jalan, terdapat juga kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh gerakan sosial ini seperti orasi, diskusi bersama, garage sale, pemutaran film, pementasan seni dan musik. Women's March Jakarta berupaya menjadikan gerakan sosial perempuan ini sebagai ruang yang aman bagi perempuan untuk menyuarakan pengalaman mereka sebagai seorang perempuan tanpa perlu merasa takut akan terancam.

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan yakni penelitian berjudul *"Speaking 'unspeakable things:' documenting digital feminist responses to rape culture"* oleh (Keller, Mendes, & Ringrose, 2018) meneliti mengenai serangkaian cara yang dilakukan oleh perempuan dalam menggunakan platform media digital untuk menantang budaya pemerkosaan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Sosial media seperti Twitter telah berhasil menyediakan peluang bagi perempuan untuk dapat saling terhubung antara satu sama lain dalam komunitas feminis yang lebih luas sekaligus juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk menceritakan segala pengalaman yang mungkin selama ini tidak dapat diungkapkan. Selain itu, platform sosial media Twitter tidak hanya membuat aktivisme feminis semakin terlihat dalam budaya media saja melainkan turut mampu menciptakan komunikasi yang bersifat lebih afektif.

Penelitian berikutnya yang dilakukan juga oleh (Mendes, Keller, & Ringrose, 2019) dengan judul *"Digitized narratives of sexual violence: Making sexual violence felt and known through digital disclosures"* menjelaskan bahwa dengan munculnya teknologi digital telah membentuk cara-cara baru untuk melakukan komunikasi serta pengungkapan terkait pengalaman individu yang mungkin sebelumnya tidak dapat diungkapkan. Sosial media Twitter dan Tumblr yang merupakan bentuk dari komunikasi digital telah berhasil melahirkan "narasi digital" dimana membahas persoalan kekerasan seksual. Secara khusus, kampanye digital dilakukan bukan hanya untuk menentang kekerasan seksual saja, tetapi juga berperan

memberikan kesempatan untuk bersuara dan memberikan alternatif bentuk keadilan kepada korban. Kampanye digital seperti Who Needs Feminisme? dan #BeenRapedNeverReported merupakan contoh cara bagaimana publik menggunakan teknologi untuk membuat nyata, menantang, dan mengungkap kekerasan seksual.

## **1.2 Teori Terkait**

### **1.2.1 Kekerasan Seksual**

Sebagaimana dikutip dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komnas Perempuan (2018) kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dinilai telah merendahkan, menghina, menyerang terhadap tubuh korban secara paksa karena adanya ketimpangan relasi kuasa, gender atau sebab lainnya sehingga berujung menyebabkan penderitaan pada korban. Terdapat 15 bentuk kekerasan seksual antara lain : (1) perkosaan, (2) intimidasi seksual, (3) pelecehan seksual, (4) eksploitasi seksual, (5) perdagangan perempuan (6) prostitusi paksa, (7) perbudakan seksual, (8) pemaksaan perkawinan, (9) pemaksaan kehamilan, (10) pemaksaan aborsi, (11) pemaksaan kontrasepsi, (12) penyiksaan seksual, (13) penghukuman bernuansa seksual, (14) praktik tradisi bernuansa seksual, (15) kontrol seksual.

Menurut Arvia dan Ghina yang dikutip melalui (Candraningrum, 2016) kekerasan seksual kerap menimpa kelompok-kelompok yang dinilai rentan yakni dengan korban paling banyak ialah perempuan. Alasan mengapa perempuan kerap menjadi korban kekerasan karena adanya sebuah wujud ketimpangan relasi kuasa sehingga menyebabkan laki-laki melakukan kontrol dan dominasi terhadap perempuan. Sebagaimana menurut Rokhmansyah, hal tersebut terjadi pada perempuan tentunya tidak terlepas dari sistem patriarki yang telah cukup lama tertanam dalam kebudayaan masyarakat sehingga menyebabkan terciptanya kesenjangan serta ketidakadilan gender bahkan sekaligus memberikan pengaruh hingga ke berbagai aspek kehidupan (Sakina & A., 2017).

Kaum laki-laki dinilai memiliki peran kontrol dan kuasa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Selain itu, budaya patriarki ini juga menciptakan berbagai macam pembatasan peran yang diperoleh dan dimiliki perempuan yakni antara lain pada sektor domestik dalam kehidupan rumah tangga serta sektor publik di luar kehidupan rumah tangga (Ilham, 2019). Hal tersebut kemudian akan berdampak dengan diperolehnya perlakuan diskriminasi bahkan tindak kekerasan terhadap kaum perempuan (Sakina & A., 2017).

### 1.2.2 Critical Feminist Theory

Menurut Gill (2007) feminisme didefinisikan untuk mengisyaratkan kekhawatiran tentang ketidaksetaraan gender, dan bentuk-bentuk penindasan lain yang berkaitan dengan ras, etnis, kelas, usia, seksualitas, kecacatan, dan status kesehatan. Menurut Megawangi yang dikutip melalui Sutarso (2011) pada kenyataannya perempuan memiliki kodrat yang berbeda dengan laki-laki. Sehingga perlunya memberikan kesetaraan dengan menimbang konteks-konteks yang ada pada keduanya.

Feminism kritis bertujuan untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh perlakuan secara adil agar kebutuhan spesifik mereka terpenuhi dengan turut melihat perbedaan kemampuan fisik diantara keduanya. Salah satu contohnya seperti cuti hamil atau melahirkan yang diberikan kepada perempuan dapat disetarakan dengan hak cuti kepada laki-laki ketika sakit (Retnani, 2017). Oleh karena itu diperlukannya pemikiran mengenai bahwa pada dasarnya seluruh manusia, baik laki-laki dan perempuan berhak memperoleh hak politik, ekonomi, dan sosial secara setara (Stromquist, 2014).

Sementara itu, salah satu tujuan utama dari feminis ialah untuk memberdayakan perempuan dan menuntut persamaan hak dengan laki-laki. Hal demikian bukan berarti bahwa feminis memandang perempuan merupakan kaum yang lemah dan tertindas, melainkan pada dasarnya mereka merupakan kaum yang sudah kuat sejak awal. Hanya saja kaum feminis ingin masyarakat luas mengetahui potensi yang dimiliki oleh kaum perempuansama besarnya dengan kaum laki-laki. Feminisme dibutuhkan juga untuk mengajarkan kepada semua perempuan tentang bagaimana cara mereka bertindak dalam menentang praktik kekerasan, serta memberikan pemahaman kepada banyak individu untuk tidak lagi memandang perempuan sebagai sebuah objek (Stromquist, 2014).

Perkembangan sejarah feminisme barat terjadi dalam tiga gelombang. Feminisme gelombang pertama hanya berfokus pada hak pilih perempuan serta kesetaraan dalam perkawinan, seksualitas, kepemilikan properti, dan masalah ekonomi. Kemudian, gerakan tersebut mengalami perkembangan terlihat dari lahirnya feminisme gelombang kedua. Gerakan baru ini lebih memusatkan perhatian pada lingkup budaya dan sosial, termasuk persoalan hak-hak reproduksi, masalah keluarga, kekerasan sekaligus kesetaraan di tempat kerja. Namun, sayangnya gerakan ini ternyata banyak memperoleh kritik karena dirasalebih memperhatikan perempuan kulit putih kelas atas saja dan mengabaikan pengalaman perempuan kulit hitam (Gill, 2007).

Melihat dari keterbatasan yang dimiliki oleh gerakan feminisme gelombang kedua, melandasi munculnya feminisme gelombang ketiga sebagai gerakan terbaru dengan lebih memberikan banyak perhatian pada kelompok perempuan non kulit putih. Menurut Gamble (dalam Suwastini, 2013) gerakan ini juga menolak pemikiran bahwa penindasan terhadap perempuan bersifat seragam dan universal. Feminisme gelombang ketiga menggarisbawahi adanya berbagai isu (*intersectionality*), baik dari elemen keragaman ras, kelas, maupun seksualitas (Gill, 2007).

Dari penjelasan di atas, maka penelitian ini menggunakan teori feminis kritis yang merupakan pengakuan mengenai berbagai bentuk penindasan yang ada (Geisinger, 2011). Menurut Menkel Meadow (dalam Rhode, 1990) feminis kritis berawal dari sudut pandang pengalaman orang-orang yang tertindas, didominasi serta sama sekali tidak dihargai. Teori feminis kritis dapat menjelaskan pentingnya konteks historis dan membantu penelitian ini untuk melihat keterlibatan mengenai kebijakan yang menindas dimana kemudian akan membentuk pemahaman kita terkait persoalan kekerasan (Geisinger, 2011).

Teori feminis kritis juga menjelaskan mengenai penindasan bersifat endemik dalam masyarakat dimana dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar. Sehingga platform, praktik keadilan sosial, serta pengungkapan pengalaman-pengalaman perempuan merupakan satu-satunya cara untuk menghilangkan diskriminasi gender, bentuk-bentuk penindasan dan ketidakadilan lainnya (Geisinger, 2011).

### 1.2.3 Perempuan dan Gerakan Online

Hadirnya internet sebagai bentuk dari teknologi baru dengan segala kemampuannya untuk menghubungkan seluruh individu di berbagai belahan dunia melalui cara yang belum pernah ada sebelumnya telah berhasil membuat khalayak luas tertarik untuk memanfaatkannya. Melihat fenomena tersebut kemudian turut mendesak kaum perempuan untuk menggunakan teknologi internet guna menjalankan aktivisme feminis mereka (Guha et al., 2019).

Kemunculan teknologi internet sekaligus platform sosial media telah menyediakan ruang bagi para perempuan di seluruh dunia yang memperoleh kekerasan seksual untuk dapat berbagi perihal segala pengalaman menyakitkan mereka. Dapat dilihat pada saat ini, banyak bermunculan gerakan yang menuntut penghapusan kekerasan seksual pada perempuan dengan memanfaatkan platform online untuk memperoleh dukungan dan kekuatan (Guha et al., 2019).

Salah satu gerakan yang dalam usahanya menentang segala bentuk kekerasan seksual dengan cara menghidupkan percakapan publik melalui penggunaan alat-alat digital seperti jejaring sosial ialah gerakan #MeToo. Sejak dimulainya gerakan #MeToo di Amerika Serikat, gerakan tersebut telah berhasil mendorong jutaan orang untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan dan pelecehan yang mereka dapatkan (Sotyati, 2017). Gerakan ini awalnya hanya merupakan organisasi kecil yang berusaha untuk menangani penyembuhan bagi penyintas kekerasan seksual, khususnya perempuan kulit berwarna di Alabana. Kemudian seiring perkembangannya dengan memanfaatkan platform online telah mendorong gerakan ini memperoleh sorotan publik (Me Too Movement, 2018).

Perbincangan perihal kekerasan seksual pada nyatanya tidak hanya terbatas di Amerika Serikat saja, melainkan mulai mencapai jangkauan global. Menengok dari keberhasilan gerakan tersebut kemudian mendorong munculnya berbagai gerakan lain yang serupa dalam berbagai bahasa. Bahkan, pada saat ini para perempuan di 85 negara yang berbeda juga telah menggunakan tagar seperti #MeToo, #TimesUp, #Losha, #WhyIDidntTeport, #NiUnaMenos dan lainnya dalam rangka menentang praktik segala bentuk kekerasan yang terjadi dan guna menuntut sebuah perubahan (Mardavi, 2018).

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kampanye anti kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia dikonstruksikan melalui gerakan Women's March Jakarta. Sehingga rumusan masalah yang dibentuk adalah bagaimana kampanye anti kekerasan seksual dikonstruksikan dalam gerakan ini?

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan secara mendalam melalui objek penelitian (Pujileksono, 2015). Jenis riset yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif. Jenis riset deskriptif akan membantu penelitian ini untuk membuat deskripsi secara sistematis, sesuai fakta, dan akurat terkait dengan objek penelitian serta mampu memberi gambaran terkait realitas (Kriyantono, 2006).

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yakni analisis isi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis isi deskriptif bertujuan untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai suatu pesan atau teks dari media (Eriyanto, 2011). Unit analisis merupakan bagian

dari isi yang ingin diteliti dan dijelaskan. Bagian dari isi inidapat berupa kata, kalimat, foto, scene, paragraph (Eriyanto, 2011). Unit analisis dalam penelitian ini berupa teks-teks dan gambar sebagai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh gerakan sosial Women's March Jakarta dalam melakukan konstruksi atas anti kekerasan seksual pada perempuan di Indonesia. Sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni postingan Instagram Women's March Jakarta pada tahun 2019.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan kegiatan observasi non partisipan dimana peneliti saat melakukan observasi tidak perlu terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang diteliti (Kriyantono, 2006). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi dan wawancara secara online sebagai teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai pendukung analisis dan interpretasi data (Kriyantono, 2006). Kemudian, validitas analisis penelitian ini dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber bertujuan membantu peneliti untuk melakukan pengecekan kembali derajat kebenaran suatu informasi yang didapatkan dari sumber yang berbeda. Sumber data primer pada penelitian ini ialah postingan Instagram gerakan Women's March Jakarta terkait dengan kekerasan, sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti secara online dengan mengirimkan pertanyaan melalui email Women's March Jakarta.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil Penelitian**

##### **3.1.1 Keikutsertaan peserta dalam #WhyIMarch**

Keikutsertaan peserta dalam gerakan Women's March Jakarta ditunjukkan melalui beberapa postingan di sosial media Instagram mereka dengan menggunakan #WhyIMarch. Seperti yang terlihat pada postingan @WomensMarchJkt, para peserta menyatakan alasan mereka memilih bergabung sekaligus memberikan dukungan pada aksi ini. Salah satunya yakni peserta bernama Puji yang mengaku bahwa gerakan ini merupakan ruang yang aman untuk perempuan berbagi pengalaman mereka.



Gambar 1. Keikutsertaan peserta dalam gerakan melalui #WhyIMarch

*Karena menurut saya Women's March Jakarta merupakan ruang yang cukup aman. Lewat gerakan ini saya juga bisa menyuarakan segala pengalaman saya sebagai seorang perempuan tanpa harus takut terancam karena saya seorang perempuan.*

Selanjutnya, terdapat alasan dari peserta lain bernama Alex yang setiap tahunnya mengikuti aksi ini dikarenakan ia merasa bahwa dengan gerakan ini semua orang dapat menyuarakan isu apapun.

*Menurutku Women's March itu media yang bagus banget buat nyuarain isu apapun soalnya gerakan ini sifatnya interseksional. mulai dari ngomongin isu soal LGBTQ, isu perempuan dan anak, apapun itu kamu bisa banget omongin lewat sini.*

Terlebih lagi pada saat ini yang menjadi concern utama gerakan Women's March Jakarta ketika berbicara seputar isu perempuan yakni dilihat dari masih meningkatnya angka kekerasan seksual seperti yang diungkapkan oleh peserta bernama Neqy. Menurutnya juga, alasan mengapa kekerasan seksual merupakan isu yang penting karena masih banyaknya kasus-kasus tentang kekerasan seksual yang belum berhasil terungkap.

*Kekerasan seksual menurutku jadi isu yang paling penting saat ini, sih. Bisa kita semua lihat dari adanya peningkatan kasus tindakan kekerasan yang terjadi. Pastinya dengan melihat apa yang telah terjadi kita semua melalui gerakan ini ingin menyuarakan lebih khususnya untuk para korban yang mengalami kejadian tersebut. Selain itu, kita juga ingin menyuarakan soal betapa banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang sampai saat ini masih belum mendapatkan perhatian serta terungkap di data komnas perempuan, melainkan cerita terkait pengalaman menyakitkan tersebut banyak beredar dan kita temukan di sosial media.*

Selain itu, peserta bernama Yoane dalam postingan berikut ini mengatakan keikutsertaannya ke dalam aksi ini karena ia melihat banyaknya korban yang sebenarnya sudah memiliki keberanian untuk menyuarakan pengalaman menyakitkan mereka ke publik ketika memperoleh kekerasan seksual, namun kenyataannya para korban ini masih sangat minim mendapat dukungan dari orang-orang sekitar.

*Fokus isunya lebih mengarah ke kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Pada faktanya juga, sebenarnya udah banyak korban kekerasan seksual yang mencoba untuk ngomong ke publik atau speak up soal pengalaman mereka tapi kenyataannya banyak dari mereka yang ceritanya masih aja engga didengerin. Nah disini kita ingin orang-orang di luar sana buat ngasih support ke para korban mungkin salah satunya dengan cara hear their stories dan jangan ngelakuin victim blaming dimana ketika ada kasus kekerasan seksual selalu menyalahkan korban.*

Menurut Yoane, pentingnya mendengarkan segala pengalaman dan tidak melakukan victim-blaming kepada para korban merupakan bentuk dari dukungan yang dapat kita berikan untuk saling menguatkan sekaligus mampu membantu menghentikan tindakan kekerasan seksual agar tidak terus terjadi.



Kemudian hal di atas turut didukung dengan pernyataan peserta bernama Emily yang berharap dengan adanya gerakan ini mampu memberikan kesadaran pada seluruh masyarakat, bahwasannya kasus kekerasan seksual yang kerap menimpa kaum perempuan merupakan hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari kita semua. Emily juga mengatakan bahwa pentingnya bagi kita semua secara bersama-sama mencari cara untuk mengatasi, mengurangi bahkan menghentikan isu tersebut.

*Aku berharanya dengan adanya Women's March kita semua bisa raising awareness ke masyarakat umum bahwa hal ini benar-benar ada dan terjadi di sekitar kita.*

Kekerasan seksual bukanlah merupakan isu milik perempuan saja, melainkan merupakan isu semua orang. Oleh sebab itu, sangatlah penting adanya kesadaran akan hal tersebut untuk terus ditumbuhkan. Pada dasarnya, ketika masih adanya satu kelompok manusia yang memiliki hidup dengan perasaan yang tertindas, maka tidak akan ada kesejahteraan bagi manusia-manusia lainnya. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh peserta bernama Shera yang sekaligus merupakan seorang penyintas.



Gambar 2. Keikutsertaan peserta dalam gerakan melalui #WhyIMarch

*Aku merupakan seorang penyintas jadi aku lebih memfokuskan pada isu soal kekerasan seksual. Disini aku ingin berbicara juga mengenai isu ini sebenarnya isu milik semua orang, bukan hanya masalah perempuan saja. Ketika kita masih melihat adanya satu kelompok manusia yang hidupnya masih merasa tertekan maka tidak ada juga kesejahteraan bagi kelompok manusia lainnya. Jadi, ayo kita semua harus maju bersama-sama, salah satunya dengan cara melakukan aksi protes turun ke jalan menentang isu tersebut.*

Shera yang merupakan seorang penyintas melihat bahwa dengan masih banyaknya isu-isu masalah perempuan yang sampai sekarang belum terselesaikan, maka kita semua masih harus tetap berjuang untuk mengubah budaya yang melanggengkan kekerasan dan pelecehan dengan berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk menghentikan tindakan kekerasan tersebut.

Pernyataan Shera di atas didukung juga oleh salah satu peserta laki-laki dalam aksi ini yaitu Arie yang merupakan seorang komika Indonesia. Ia mengatakan bahwa keikutsertaannya ke dalam aksi ini dikarenakan kekerasan dan pelecehan seksual bukan merupakan isu satu kelompok saja, melainkan isu semua orang. Arie paham mengenai permasalahan yang dialami banyak perempuan di luar sana khususnya terkait dengan kekerasan seksual setelah dirinya melakukan banyak perbincangan dengan teman-teman perempuannya.



Gambar 3. Keikutsertaan peserta dalam gerakan melalui #WhyIMarch

*Sebenarnya alasan saya ikut ke dalam gerakan ini karena saya peduli dengan masalah yang kerap menimpa kaum perempuan. Saya punya banyak teman perempuan jadi banyak ikutan ngobrol soal isu-isu perempuan misalnya kasus pemerkosaan. Permasalahan yang saya perhatikan ialah saya sebagai laki-laki, jauh sebelum itu, dapat dibilang tidak terlalu concern tentang hal-hal tersebut.*

Selain itu, Arie mengungkapkan yang seharusnya juga menjadi concern utama untuk kita semua agar mampu menghadapi isu-isu yang terjadi pada saat ini terkait kekerasan dan pelecehan adalah dengan menanamkan pendidikan sejak usia dini. Menurutnya, apabila masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih luas seputar kekerasan seksual, maka mereka juga akan mengetahui hal apa yang seharusnya dilakukan untuk dapat menghentikannya.

*Menurut saya untuk menghadapi isu tersebut perlunya pendidikan sejak usia dini. Ketika kita yang ada di generasi sekarang gagal menghadapi persoalan isu perempuan termasuk kekerasan seksual, kita masih bisa berharap lewat generasi selanjutnya karena mereka akan jauh lebih paham perihal apa yang seharusnya dilakukan. Selain itu, menurut saya alasan mengapa bangsa kita terbilang tidak cukup mampu dalam menghadapi persoalan yang terjadi yakni dikarenakan ketika terjadi pemerkosaan, masyarakat masih saja menyalahkan pihak korban.*

### 3.1.2 Kondisi kekerasan seksual di Indonesia

Pada kategori berikut menjelaskan mengenai bagaimana kondisi kekerasan seksual di Indonesia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan semakin beragam dengan intensitas yang semakin meningkat serta terjadi di berbagai ruang, baik ranah publik maupun ranah privat. Kemudian, hal tersebut kembali disampaikan oleh gerakan

Women's March Jakarta melalui beberapa postingan sosial media mereka perihal upaya menyuarakan isu kekerasan seksual di Indonesia yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sekaligus gerakan ini turut menyampaikan betapa pentingnya isu ini untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah maupun seluruh masyarakat guna menghentikan kenaikan kasus tersebut.

Seperti yang diungkapkan melalui postingan video oleh Anindya Restuviani selaku aktivis dari Jakarta Feminis dan Hollaback! Jakarta sekaligus pengurus dalam gerakan Women's March Jakarta, sebagai berikut :

*Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, terdapat 406.000 perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan di tahun 2018. Sejak tahun 2014, Indonesia dinyatakan darurat kekerasan seksual karena jumlah kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya.*

Selain itu, Anindya juga mengungkapkan bahwa perlunya upaya untuk menangani segala kasus kekerasan dengan menetapkan serangkaian peraturan yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual guna melindungi, memulihkan korban kekerasan sekaligus untuk menghukum pelaku kekerasan. Hal tersebut turut didukung oleh pernyataan hasil wawancara secara online dengan salah satu anggota dalam gerakan ini, yakni bernama Mia. Ia mengatakan bahwasannya :

*Pengesahan RUU-PKS merupakan salah satu tuntutan teratas dari gerakan ini yang dinilai sudah sangat mendesak untuk diloloskan.*

Melalui unggahan video di atas, Women's March Jakarta juga hendak mengajak seluruh masyarakat yang peduli perihal isu perempuan yang terjadi untuk bergabung dalam gerakan ini demi terciptanya keadilan bagi semua masyarakat. Seperti yang juga diungkapkan oleh salah satu anggota gerakan ini yakni Mia melalui wawancara secara online, sebagai berikut :

*Melihat dari situasi di Indonesia yang dinilai mendesak, maka tercetuslah gagasan untuk juga turut mengorganisir Women's March di Indonesia yang awalnya gerakan ini merupakan gerakan global yang ada di Amerika. Women's March di Indonesia tentunya menyesuaikan isu-isu yang ada terjadi disini.*

Kemudian, bukti lain yang mengungkapkan mengenai kondisi kekerasan seksual di Indonesia serta perlunya untuk RUU PKS segera disahkan yakni karena terlihat masih banyaknya korban yang belum mendapatkan perlindungan sekaligus keadilan seperti halnya yang dijelaskan pada postingan yang berisikan informasi seputar serangkaian acara dari

Women's MarchJakarta yaitu diskusi bersama yang berjudul “*Kekerasan Seksual dan Gerakan #Metoo di Kampus*”.



Gambar 4. Kegiatan diskusi bersama kekerasan seksual

Dalam postingan di atas dijelaskan mengenai banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di segala ranah, baik domestik maupun publik. Salah satu kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah publik yakni pada lingkup kampus seperti kasus yang dialami oleh Agni seorang mahasiswi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kasus yang dialami oleh Agni bukan merupakan satu-satunya kasus kekerasan seksual pertama yang terjadi di kampus tentunya.

Kemudian, terdapat juga postingan yang diunggah oleh gerakan ini dalam memperingati Hari Perempuan Nasional “Kita Semua Setara” yang menjelaskan terkait kondisi kekerasan seksual di Indonesia.

*Semua terlihat dari persoalan-persoalan yang masih perlu dihadapi oleh perempuan. Mulai dari tingkat angka perkawinan anak yang terbilang cukup tinggi. Lalu, kekerasan terhadap perempuan juga terbilang masih cukup sering terjadi. Suara perempuan yang sampai saat ini jarang didengar. Banyak pekerja perempuan masih sering dipecat karena menikah atau hamil. Perlindungan hukum untuk perempuan masih jauh dari yang diharapkan.*

Dalam postingan tersebut dijelaskan bahwa para perempuan di Indonesia masih belum cukup mendapatkan perlindungan hukum yang baik terkait dengan perihal seperti kasus kekerasan seksual dan isu-isu perempuan lainnya.

### 3.1.3 Perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan seksual

Pada kategori ini, telah terkumpul beberapa postingan melalui akun @WomensMarchjkt yang menunjukkan bahwa gerakan Women's MarchJakarta dalam melakukan kampanye memiliki beberapa daftar tuntutan antara lain seperti yang terlihat melalui postingan yang mereka unggah melalui sosial media Instagram.



Gambar 5. Tuntutan gerakan Women's MarchJakarta

Tuntutan tersebut terdiri dari : (1) mendesak pengesahan rancangan undang-undang terkait dengan kekerasan, diskriminasi, stigma, represi terhadap perempuan di berbagai sektor, (2) menghapus peraturan dan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif, (3) memastikan pelaksanaan UU Desa dan nelayan mengakomodasi kebutuhan perempuan, (4) memastikan pelaksanaan UU perlindungan pekerja migran perempuan dan memberantas tindakan eksploitasi dan perdagangan manusia, (5) memberantas tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan kriminalisasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas lainnya, (6) menegakkan sistem hukum yang berkeadilan gender, (7) menegakkan pembangunan dengan berlandaskan keadilan gender, (8) menegakkan akses politik dengan berlandaskan keadilan gender, (9) menegakkan kurikulum pendidikan termasuk pendidikan kesehatan mental dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang adil gender, (10) memastikan berjalannya perlindungan sosial termasuk jaminan dan akses pada pelayanan kesehatan yang berlandaskan keadilan gender.

Semua daftar tuntutan tersebut merupakan tujuan dari gerakan ini dilakukan, seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota dari Women's March Jakarta yakni Mia melalui wawancara secara online :

*Harapannya semua daftar tuntutan yang dimiliki oleh gerakan Women's MarchJakarta mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat seluas-luasnya.*

Salah satu yang menjadi tuntutan teratas dalam gerakan ini ialah terkait tentang pengesahan RUU PKS dengan tujuan dapat memberikan keadilan serta perlindungan hukum untuk para korban kekerasan seksual. Pentingnya tuntutan tersebut karena dirasa pada saat ini isu mengenai kekerasan seksual merupakan isu yang cukup penting dan perlunya mendapatkan perhatian dari pemerintah serta masyarakat seluas-luasnya. Tuntutan keadilan untuk semua juga diunggah oleh gerakan ini ketika memperingati Hari Keadilan Sosial Sedunia.

*Pada dasarnya konsep keadilan tidak jauh dari keterkaitannya dengan perihal kesejahteraan. Konsep keadilan juga termuat di dalam Pancasila Sila ke-5 yang meyakini bahwa keadilan tidak hanya untuk sebagian rakyat ataupun mayoritas rakyat, melainkan untuk seluruh rakyat. Cita-cita tersebut kemudian menjadi refleksi apakah perempuan sudah memperoleh hak-haknya dalam mengakses keadilan. Misalnya jika dilihat pada konteks persoalan kekerasan*

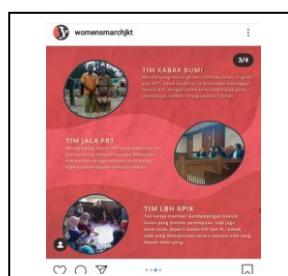
*seksual, apakah korban sudah mendapatkan akses berupa keadilan dalam sistem hukum di Indonesia*

Postingan tersebut menjelaskan bahwa dengan menengok masih tingginya kasus kekerasan seksual, memang diperlukannya untuk menjunjung tinggi keadilan untuk perempuan sesuai dengan bunyi sila ke-5 dalam Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya, bagi para korban kekerasan seksual dalam memperoleh akses untuk menuntut keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam mewujudkan keadilan bagi para korban tersebut, maka diperlukannya upaya yang dilakukan oleh Negara antara lain meliputi pencegahan, perlindungan yang memberikan prioritas pada korban, menuntut serta sekaligus menghukum pelaku kekerasan, dan menyediakan pemulihan pada korban.

Melihat situasi dan kondisi saat ini, sangatlah penting untuk mendesak RUU PKS segera disahkan. Kebutuhan memberikan payung hukum yang melindungi korban kekerasan merupakan bukti dari representasi kehadiran Negara terhadap korban. Seperti yang dijelaskan pada unggahan video @womensmarchjkt mengenai tujuan dari mesti segera disahkannya RUU PKS yakni salah satunya berkaca dari kasus pelecehan yang menimpa Baiq Nuril serta melihat masih banyaknya korban pelecehan lainnya yang dikriminalisasi sebab tidak terdapatnya perlindungan secara hukum untuk para korban.

*Tujuan dari dibuatnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah untuk melindungi perempuan seperti Baiq Nuril yang menjadi korban pelecehan seksual namun justru ia terkena pasal pidana dengan menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE.)*

Kemudian untuk mewujudkan tujuan di atas, Women's March Jakarta melakukan bentuk kerja sama dengan beberapa organisasi lain yang bekerja di bidang yang sama dalam membantu individu yang mengalami ketidakadilan, kekerasan dan sekaligus diskriminasi.



Gambar 6. Organisasi yang bekerja sama dengan Women's March Jakarta

Organisasi tersebut antara lain, yakni (1) LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) yang berusaha mendampingi penyintas kekerasan terhadap perempuan

dan anak. Seperti kasus yang dialami oleh kakak beradik berinisial YSY dan AL, mereka berdua dieksploitasi secara seksual oleh sang nenek demi memperoleh uang. (2) Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI) yang membantu pekerja migran Indonesia di luar negeri. Organisasi ini pernah mendampingi migran asal NTT bernama Yufrinda yang awalnya dilaporkan telah hilang selama 1 tahun kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal bunuh diri dengan tanda-tanda adanya tindak kekerasan pada jenazahnya. (3) Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) yang membantu pekerja rumah tangga. Mendampingi Marni, PRT yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari majikannya saat bekerja.

Selain itu, Women's March Jakarta juga melakukan beberapa serangkaian acara yang menjadi kegiatan di dalam gerakan mereka yakni salah satunya berupa aksi turun ke jalan "*Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*" dengan para peserta membawa poster dukungan mereka terhadap tuntutan tersebut. Kemudian adanya acara *Feminist Festival 2019* yang berisikan beberapa kegiatan seperti pleno berhadapan dengan hukum sekaligus kelas diskusi membahas RUU PKS dan KUHP.



Gambar 7. Aksi protes turun ke jalan

Beberapa kegiatan yang dilakukan tersebut tidak terlepas dari upaya gerakan ini dalam menggiring isu mengenai pentingnya RUU PKS agar segera disahkan oleh pemerintah guna memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Pernyataan tersebut didukung juga oleh hasil wawancara secara online dengan anggota Women's March Jakarta bernama Mia, sebagai berikut :

*Women's March Jakarta mencakup ribuan individu dan 30 lebih anggota/komunitas yang menjadi mitra di dalam gerakan ini dimana tuntutan untuk pengesahan RUU PKS adalah tuntutan teratas dan itu selalu kita sosialisasikan di semua kegiatan-kegiatan Women's March Jakarta dan di setiap liputan media juga.*

Dalam mencapai tujuan yang dimiliki oleh Women's March Jakarta agar RUU PKS diloloskan, gerakan ini turut membentuk kekuatan dan dukungan dari seluruh masyarakat

yang tergabung dan berbagai organisasi yang telah menjadi mitra mereka. Sekaligus memanfaatkan dari hadirnya teknologi untuk menyebarkan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan gerakan.

### **3.2 Pembahasan**

Kampanye terkait anti kekerasan seksual dikonstruksikan dalam gerakan Women's March Jakarta salah satunya terlihat pada keikutsertaan peserta ke dalam gerakan ini melalui postingan #WhyIMarch. Dilihat dari isu mengenai kekerasan seksual yang menjadi fokus utama dalam gerakan ini, para peserta mengatakan bahwa gerakan ini mampu menjadi ruang yang aman untuk korban dalam menyuarakan segala pengalaman terkait kekerasan seksual yang mereka peroleh.

Kemudian, praktik kekerasan pada perempuan ketika dikaitkan dengan teori feminis kritis merupakan bentuk dari berbagai jenis penindasan yang ada dan pengalaman orang-orang yang didominasi dan tidak dihargai (Geisinger, 2011). Hal tersebut ditunjukkan dengan terdapatnya peserta yang tergabung dalam gerakan ini bernama Shera yang sekaligus merupakan seorang penyintas kekerasan seksual. Pengertian dari penyintas kekerasan seksual sendiri merupakan seseorang yang telah mengalami tindakan kekerasan seksual namun ia memiliki keberanian untuk mengungkapkan pengalaman menyakitkan mereka ke publik (Muhid, Fauziyah, Khariroh, & Andiarna, 2019).

Peneliti menemukan bahwa ketika adanya keikutsertaan penyintas ke dalam gerakan ini disertai dengan keberaniannya untuk bersuara menandakan bahwa ia telah memasukan dirinya sebagai subjek dari sebuah isu kekerasan seksual. Suara dari seorang penyintas dianggap penting karena mampu menghapuskan ketakutan yang dialami oleh korban-korban kekerasan lain dalam mengungkapkan pengalaman menyakitkan mereka karena menganggap dirinya mendapatkan tindakan kekerasan seksual sendirian. Sehingga dengan adanya pengungkapan tersebut mereka dapat memberikan perlindungan satu sama lain dan sekaligus membentuk kekuatan untuk menghentikan kekerasan seksual (Keplinger, Johnson, Kirk, & Barnes, 2019).

Melalui gerakan ini, para peserta secara bersama ingin membuka bungkaman para korban yang mengalami kekerasan seksual dan membawanya ke publik. Menurut Young dan McGuire, seseorang mampu memahami mengenai serangan yang mereka peroleh dilihat dari bagaimana cara mereka mendiskusikan pengalaman kekerasan seksual yang mereka alami



kepada orang lain (Mendes et al., 2019). Hal berikut kemudian turut didukung dengan munculnya teknologi internet pada saat ini yang membentuk cara-cara baru bagi semua orang untuk berkomunikasi, bercerita, serta melakukan pengungkapan perihal pengalaman yang dulunya tidak terlihat sampai akhirnya terlihat (Mendes et al., 2019).

Peneliti menemukan bukti teknologi internet dapat mengungkap pengalaman kekerasan seksual yang dialami oleh seseorang ditunjukkan melalui postingan peserta yang mengatakan bahwa masih terdapat banyak kasus-kasus mengenai kekerasan seksual yang tidak terungkap dalam data komnas perempuan melainkan banyak mereka temukan melaluisosial media. Sehingga, dengan adanya gerakan ini yang turut mengandalkan hadirnya internet dan sosial media mampu menumbuhkan kesadaran ke masyarakat umum bahwa tindakan kekerasan seksual merupakan hal yang benar-benar terjadi dan menimpa orang yang ada di sekitar kita. Melihat hal berikut juga menjadi bukti bahwa platform sosial media dan teknologi internet telah digunakan oleh perempuan dengan berbagai macam tujuan antara lain untuk membentuk jaringan, dukungan, mengungkap dan menentang kekerasan seksual (van Doorn, 2010).

Peneliti juga melihat bahwa gerakan ini tidak hanya diikuti oleh kaum perempuan saja, melainkan terdapat juga peserta laki-laki yang bergabung. Seperti yang dijelaskan oleh Hasyim (2017) bahwa pada saat ini bukan hanya perempuan saja yang menyatakan dirinya sebagai feminis, melainkan laki-laki juga percaya terhadap gagasan-gagasan mengenai kesetaraan hak dalam berbagai aspek kehidupan serta turut mendukung gerakan feminis ini sebagai gerakan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan terhadap perempuan.

Salah satu peserta laki-laki dalam gerakan ini yakni peserta bernama Arie. Arie mengaku dirinya turut mendukung gerakan ini untuk penghapusan kekerasan seksual yang terjadi. Seperti yang diungkapkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Anderson (2005), bahwa tidak dapat dipungkiri kaum laki-laki juga memiliki peran untuk ambil andil dalam menghentikan masalah kekerasan yang terjadi karena sebagian besar pelaku kekerasan adalah laki-laki. Meskipun demikian, menurut Waldo (dalam Keplinger et al., 2019) bukan berarti bahwa laki-laki tidak mengalami kekerasan seksual sama sekali, tetapi tingkat frekuensi laki-laki mendapatkan kekerasan seksual lebih rendah dibandingkan dengan perempuan.

Selanjutnya pada kondisi kekerasan seksual di Indonesia, peneliti menemukan bahwa salah satu latar belakang gerakan Women's March Jakarta melakukan aksinya karena adanya

peningkatan angka kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun dan Indonesia telah dinyatakan pada tahap darurat. Hal berikut juga didukung dengan postingan yang disampaikan oleh Anindya Restuviani selaku aktivis dari gerakan ini dengan menyertakan data yang diperoleh dari Komnas Perempuan terkait semakin beragamnya jenis kekerasan seksual dengan intensitas kasus yang terjadi di berbagai ranah.

Beragamnya jenis kekerasan seksual yang ditemukan oleh peneliti antara lain terkait dengan masih cukup tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil riset Kesehatan Dasar dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Indonesia menempati urutan ke 2 tertinggi di ASEAN (Qibtiyah, 2014). Menurut Undang-Undang tentang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menjelaskan perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Sehingga, apabila melakukan pernikahan di bawah umur tersebut maka disebut dengan pernikahan dini.

Menurut BKKBN, beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini pada anak yakni kelirunya masyarakat dalam melakukan pemahaman terkait ajaran agama, sosial budaya, dan tentunya terdapat desakan faktor ekonomi serta rendahnya pendidikan (Widyawati & Pierewan, 2017). Faktor budaya yang masih sangat sering terjadi pada masyarakat adalah ketika terjadinya kehamilan pada anak perempuan mereka diluar pernikahan, pihak keluarga akan secara paksa menikahkan anak perempuannya dengan pelaku tanpa melihat umur, mental, dan kesiapan keduanya untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, terdapat anggapan negatif juga bahwa apabila anak perempuan yang belum menikah dianggap tidak laku atau biasa disebut dengan perawan tua, sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya ketika masih berusia belia (Pohan, 2017).

Faktor ekonomi juga berperan terhadap terjadinya fenomena tersebut seperti yang telah ditemukan peneliti pada penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2017) terdapat anggapan bahwa ketika anak perempuan menikah pada usia dini akan turut membantu meringankan beban ekonomi orang tua mereka. Tentunya hal tersebut didukung dengan minimnya pendidikan serta pengetahuan mengenai dampak dari menikah pada usia dini. Menurut Pohan (2017) dampak dari pernikahan dini pada anak lebih sering terlihat dialami oleh anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip melalui Saskara (2018) fenomena pernikahan dini pada anak akan membuat anak perempuan lebih memiliki resiko yang tinggi mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis

maupun emosional. Hal tersebut tentunya disebabkan karena adanya beberapa masalah seperti ketidaksiapan ekonomi, masih sangat labilnya mereka dalam menghadapi berbagai masalah rumah tangga, serta adanya kontrol atas hidup mereka.

Selain itu, data berikutnya yang telah berhasil ditemukan peneliti terkait perihal beragamnya jenis kekerasan dengan dimuatnya salah satu contoh kasus yang sempat terjadi di Indonesia yakni kasus kekerasan yang dialami oleh Agni seorang mahasiswi UGM. Kemudian, hal tersebutlah yang melandasi gerakan ini untuk mengadakan diskusi bersama dalam rangka melawan kekerasan seksual di ranah kampus dengan mengadopsi gerakan aksi #MeToo. Gerakan #MeToo sendiri merupakan bentuk gerakan solidaritas terhadap korban kekerasan seksual di Amerika Serikat yang telah berhasil meruntuhkan budaya victim blaming (Martalena & Yoetadi, 2019). Keberhasilan gerakan tersebut dalam mendorong para perempuan untuk mengungkapkan perihal kasus kekerasan yang dialaminya lantas turut digunakannya aksi ini ke dalam serangkaian kegiatan Women's March Jakarta.

Melihat kondisi kekerasan seksual yang ada di Indonesia tersebut, Women's March Jakarta melalui unggahan di sosial media mereka ingin mengajak seluruh masyarakat bergabung ke dalam gerakan ini melakukan serangkaian aksi kelompok membentuk jaringan dan kekuatan untuk menyuarakan 10 daftar yang menjadi tuntutan mereka. Sedangkan, yang menjadi tuntutan teratas dalam gerakan ini yakni perihal mendesak pengesahan seluruh Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mendukung penghapusan praktik kekerasan, diskriminasi, stigma, represi terhadap perempuan dalam berbagai sektor. Selain itu, perlunya perlindungan hukum yang memadai untuk korban kekerasan telah menjadi isu global karena mengingat sebenarnya korban merupakan pihak yang dirasa paling menderita, namun justru hingga saat ini masih tidak diperolehnya payung perlindungan hukum yang semestinya (Ramdhani, 2017).

Peneliti menemukan bahwa Indonesia dapat dikatakan masih cukup jauh dari cita-cita yang dimilikinya dimana seperti termuat dalam Pancasila Sila ke-5 mengenai keadilan bagi seluruh rakyat. Hal tersebut dikarenakan ketika terjadi kekerasan, para korban belum mendapatkan akses hukum yang adil. Salah satunya berkaca dari kasus pelecehan yang menimpa Baiq Nuril serta melihat masih banyaknya korban pelecehan lainnya yang dikriminalisasi sebab tidak terdapatnya perlindungan secara hukum untuk para korban. Kemudian, dilihat melalui konteks kewajiban Negara, maka Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan pada setiap warga negaranya, khususnya pada korban

kekerasan seksual. Mengingat Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu sudah semestinya untuk diakui, dihargai, serta dilindungi di antaranya melalui berbagai produk perundang-undangan (Ramdhani, 2017).

Kemudian, untuk mewujudkan tuntutan tersebut dan sekaligus menghapuskan diskriminasi gender dan bentuk-bentuk penindasan gerakan ini melakukan bentuk kerja sama dengan beberapa organisasi lain yang juga sama halnya ingin memberikan bentuk keadilan serta pendampingan bagi para penyintas kekerasan seksual. Selain itu, adanya serangkaian kegiatan baik dilakukan secara offline seperti aksi protes massa dengan turun ke jalan dan diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan seperti diskusi bersama, menggalang dana, pemutaran film, pementasan seni dan musik. Pada aksi protes massa, para peserta yang mencakup ribuan individu dan juga 30 lebih organisasi melakukan *long march* dengan membawa poster berisikan tuntutan mereka seputar penghapusan praktik kekerasan seksual tentunya agar mendapatkan perhatian dari pemerintah.

#### **4. PENUTUP**

Penelitian ini berusaha memahami bagaimana kampanye yang dilakukan oleh gerakan Women's March Jakarta dalam melakukan konstruksi atas anti kekerasan seksual melalui berbagai kegiatan mereka baik offline dan online. Dalam praktiknya, gerakan ini turut memanfaatkan teknologi internet seperti sosial media untuk membentuk dukungan, kekuatan, dan menentang kekerasan seksual.

Dari hasil yang telah ditemukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gerakan Women's March Jakarta dilakukan berdasarkan situasi yang terjadi di Indonesia yang dinilai mendesak salah satunya seputar kekerasan seksual. Melalui gerakan ini kekerasan seksual di Indonesia dikonstruksikan sebagai sebuah isu yang masih kerap menimpa kaum perempuan. Namun, bukan berarti isu tersebut hanya milik satu pihak saja yakni perempuan, melainkan laki-laki pada dasarnya juga turut terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, isu tersebut merupakan isu milik semua orang. Selain itu, isu terkait kekerasan seksual di Indonesia juga perlu adanya peran dari Negara untuk menghapus segala bentuk praktik kekerasan yang terjadi dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Gagasan atau sudut pandang dari gerakan ini selama mengonstruksikan anti kekerasan seksual dengan memberikan ruang kepada kaum perempuan khususnya korban kekerasan untuk mengungkapkan pengalaman mereka ke publik. Selain itu, kampanye yang dilakukan

oleh gerakan Women's March Jakarta seperti lewat aksi protes secara langsung dengan turun ke jalan serta pemanfaatan sosial media merupakan alternatif bentuk keadilan untuk para korban serta sebagai bentuk aksi anti terhadap kekerasan seksual. Sebagaimana menurut Breindl yang dikutip melalui (Sanjaya, 2017) bahwasannya gerakan sosial online dan gerakan offline yang dianggap tradisional pada praktiknya keduanya tidak dapat dipisahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affan. (2019). Pelecehan seksual di ruang publik: Mayoritas korban berhijab, bercelana panjang dan terjadi di siang bolong. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49014401>
- Anderson, K. L. (2005). Theorizing gender in intimate partner violence research. *Sex Roles*, 52(11–12), 853–865. <https://doi.org/10.1007/s11199-005-4204-x>
- Bennett, L. R., Andajani-Sutjahjo, S., & Idrus, N. I. (2011). Domestic violence in Nusa Tenggara Barat, Indonesia: Married women's definitions and experiences of violence in the home. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 12(2), 1–18. <https://doi.org/10.1080/14442213.2010.547514>
- Candraningrum, D. (2016). RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Perempuan*, 21(2). Retrieved from [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)
- Dianawanti, V. (2019). Fimela Historia: Perjalanan Women's March dari Amerika Hingga Dunia. Retrieved from <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3914416/fimela-historia-perjalanan-womens-march-dari-amerika-hingga-dunia>
- Ellis, L. (1991). A Synthesized (Biosocial) Theory of Rape. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 59(5), 631–642. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.59.5.631>
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi : Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geisinger, B. N. (2011). Critical feminist theory, rape, and hooking up. *ProQuest Dissertations and Theses*, 1–53. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/874969314?accountid=11664>
- Gill, R. (2007). *Gender and the Media* (Polity Press, Ed.). Cambridge.
- Guha, P., Gajjala, R., & Stabile, C. (2019). Introduction: Sexual Violence, Social Movements, and Social Media. *Ada: A Journal of Gender, New Media, and Technology*, 2019(15). <https://doi.org/10.5399/uo/ada.2019.15.1>
- Harnoko, B. R. (2010). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *Muwazah*, 2(1), 181–

188. Retrieved from <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/16/16>
- Hasyim, N. (2017). Laki-Laki Sebagai Sekutu Gerakan Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(1), 79. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i1.1469>
- Ilham, B. (2019). KARAKTER LAKI-LAKI DALAM PROGRAM TELEVISI (Analisi Resepsi Peran Pria Sebagai Pekerja Rumah Tangga Dalam Program Sitkom “Dunia Terbalik” Di RCTI). *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 11(1), 58–72. <https://doi.org/http://journals.ums.ac.id/index.php/komuniti/article/view/5945/4855>
- Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations). *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716–734.
- Keller, J. (2017). Making Activism Accessible: *Girlhood and the Politics of Place*, 261–278. <https://doi.org/10.2307/j.ctt14jxn16.20>
- Keller, J., Mendes, K., & Ringrose, J. (2018). Speaking ‘unspeakable things’: documenting digital feminist responses to rape culture. *Journal of Gender Studies*, 27(1), 22–36. <https://doi.org/10.1080/09589236.2016.1211511>
- Kemp, S. (2019). DIGITAL 2019: INDONESIA. Retrieved from <https://datareportal.com/reports/digital-2019-indonesia>
- Keplinger, K., Johnson, S. K., Kirk, J. F., & Barnes, L. Y. (2019). Women at work: Changes in sexual harassment between September 2016 and September 2018. *PLoS ONE*, 14(7), 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218313>
- Knappe, H., & Lang, S. (2014). Between whisper and voice: Online women’s movement outreach in the UK and Germany. *European Journal of Women’s Studies*, 21(4), 361–381. <https://doi.org/10.1177/1350506814541643>
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardavi, P. (2018). How #MeToo Became a Global Movement. Retrieved from <https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-03-06/how-metoo-became-global-movement>
- Martalena, M., & Yoetadi, G. (2019). Kekerasan Seksual di Mata Konde (Analisis Framing Kekerasan Seksual terhadap Perempuan pada Rubrik Perspektif Konde Edisi November dan Desember 2018). *Koneksi*, 3(1), 7. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.6137>
- McBride, D. E., & Mazur, A. G. (2008). Women’s movements, feminism, and feminist movements. *Politics, Gender, and Concepts: Theory and Methodology*, 219–243. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511755910.010>
- Me Too Movement. (2018). Retrieved from <https://metoomvmt.org/about/>
- Mendes, K., Keller, J., & Ringrose, J. (2019). Digitized narratives of sexual violence: Making

- sexual violence felt and known through digital disclosures. *New Media and Society*, 21(6), 1290–1310. <https://doi.org/10.1177/1461444818820069>
- Muhid, A., Fauziyah, N., Khariroh, L. M., & Andiarna, F. (2019). Quality of Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif. *Journal of Health Science and Prevention*, 3(1), 47–55. <https://doi.org/10.29080/jhsp.v3i1.185>
- Perempuan, K. (2018). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Retrieved from <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>
- Pohan, N. H. (2017). Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri.. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.2283>
- Prandansari, N. A. (2018). Women's March, Gerakan Masif Perempuan Menentang Diskriminasi. Retrieved from <https://gelorasriwijaya.co/blog/womens-march-gerakan-masif-perempuan-menentang-diskriminasi/#>
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Putri. (2019). Perjalanan Women's March Indonesia: Pencapaian dan Tuntutan di 2019. Retrieved from <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3913884/perjalanan-womens-march-indonesia-pencapaian-dan-tuntutan-di-2019>
- Qibtiyah, M. (2014). Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 3(1), 50–58. Retrieved from <http://www.jurnal.unair.ac.id/download-fullpapers-biometrik289f6d5a6dfull.pdf>
- Ramdhani, I. (2017). Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 4(1), 95–120. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i1.7871>
- Retnani, S. D. P. (2017). *Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia*. 95–109. Retrieved from <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/2518>
- Rhode, D. L. (1990). Feminist Critical Theories. *Stanford Law Review*, 42, 617–638. <https://doi.org/doi:10.2307/1228887>
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Sanjaya, A. R. (2017). Wacana Lingkungan dalam Gerakan Sosial Digital Discourse of Environment in Digital Social Movement. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)*, 19(2), 133–148. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.19.2.2017.133-148>
- Saskara, I. A. N. (2018). Pernikahan Dini dan Budaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(1), 117–123. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/327543689\\_Pernikahan\\_Dini\\_dan\\_Budaya](https://www.researchgate.net/publication/327543689_Pernikahan_Dini_dan_Budaya)

- Setiawati, T. (2002). Perempuan dan HAM: Peta Permasalahan dan Agenda Aksi. *Unisia*, 25(44), 95–110. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol25.iss44.art8>
- Sihite, R. (2007). *Perempuan, kesetaraan & keadilan: suatu tinjauan berwawasan gender*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sotyati. (2017). Tarana Burke, Sosok di Balik Gerakan #MeToo. Retrieved from <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/tarana-burke-sosok-di-balik-gerakan-metoo>
- Stromquist, N. P. (2014). *Women in the Third World: an encyclopedia of contemporary issues*. Routledge, Taylor and Francis.
- Sutarso, J. (2011). Konstruksi Isu Gender Dalam Politik: Studi Kasus Pemilihan Umum 2004. *Jurnal*, 2(2), 3–13. Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/komuniti/article/view/2950/1884>
- Suwastini, N. K. A. (2013). Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 198–208. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>
- van Doorn, N. A. J. M. (2010). Digital Spaces, Material Traces: Investigating the Performance of Gender, Sexuality, and Embodiment on Internet Platforms that feature User-Generated Content. *Doctorate Thesis. Amsterdam University, Amsterdam, Netherland*. Retrieved from [https://pure.uva.nl/ws/files/1041657/72912\\_thesis.pdf](https://pure.uva.nl/ws/files/1041657/72912_thesis.pdf)
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>
- Walby, S. (1989). Theorising patriarchy. *Sociology*, 23(2), 213–234. <https://doi.org/10.1177/0038038589023002004>
- Widyawati, E., & Pierewan, A. C. (2017). DETERMINAN PERNIKAHAN USIA DINI DI INDONESIA. *Socia Jurnal Ilmu Sosial*, 14(4), 55–70. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/socia/article/view/15890/9742>